BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 283 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapaianya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, sehingga diperlukan adanya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

a. melaksanakan pemungutan, pencatatan dan pelaporan atas penerimaan PAD Tahun Anggaran 2025; dan
b. laporan atas PAD di sampaikan ke Bupati Banggai Kepulauan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Dalam penetapan target PAD, Perangkat Daerah Pengelola PAD sebaiknya memiliki database potensi dan mampu memperhitungkan proyeksi penerimaan atas jenis PAD yang dipungut dengan melakukan rekonsiliasi bersama Perangkat Daerah pemungut, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Penetapan Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Dinas, Bagian/Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat;*
5. *Bank Sulteng Pembantu Salakan di salakan; dan*
6. *Bendahara Kas Umum Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.32./ 283 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	DINAS, BAGIAN / KANTOR PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	RENCANA TARGET MURNI
1.	Badan Pendapatan Daerah	**4.1.01**	**A. PAJAK DAERAH :**	
		4.1.01.15	**1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**1.600.500.000**
		4.1.01.15.01	PBBP2	
		4.1.01.15.01.0001	*- PBBP2*	*1.600.500.000*
		4.1.01.16	**2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**100.000.000**
		4.1.01.16.01	BPHTB - Pemindahan Hak	
		4.1.01.16.01.0001	*- BPHTB - Pemindahan Hak*	*50.000.000*
		4.1.01.16.02	BPHTB - Pemberian hak baru	
		4.1.01.16.02.0001	*- BPHTB - Pemberian Hak baru*	*50.000.000*
		4.1.01.19	**3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**5.040.000.000**
		4.1.01.19.01	**PBJT-Makanan dan/atau Minuman**	**1.380.000.000**
		4.1.01.19.01.0001	*- PBJT-Restoran (RumahMakan)*	*80.000.000*
		4.1.01.19.01.0002	*- PBJT-Penyedia Jasa Boga atau katering*	*1.300.000.000*
		4.1.01.19.02	**PBJT-Tenaga Listrik**	**3.500.000.000**
		4.1.01.19.02.0001	- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.500.000.000
		4.1.01.19.03	**PBJT-Jasa Perhotelan**	**150.000.000**
		4.1.01.19.03.0001	*- PBJT Hotel*	*50.000.000*
		4.1.01.19.03.0009	*- PBJT Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage*	*100.000.000*
		4.1.01.19.04	**PBJT-Jasa Parkir**	**5.000.000**
		4.1.01.19.04.0001	*- PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir*	*5.000.000*
		4.1.01.19.05	**PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan**	**5.000.000**
		4.1.01.19.05.0007	*- PBJT- Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor*	*2.000.000*
		4.1.01.19.05.0008	*- PBJT-Permainan Ketangkasan*	*2.000.000*
		4.1.01.19.05.0009	*- PBJT-Olahraga Permainan dengan menggunakanTempat/Ruang &atau Peralatan &Perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran*	*1.000.000*
		4.1.01.09	**4. Pajak Reklame**	**75.000.000**
		4.1.01.09.01.0001	*- Pajak Reklame papan/Billboard/videotron/megatron*	*75.000.000*
		4.1.01.12	**5. Pajak Air Tanah**	**50.000.000**
		4.1.01.12.01.0001	*- Pajak Air Tanah*	*50.000.000*
		4.1.01.14	**6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)**	**1.700.000.000**
		4.1.01.14.37.0001	*- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya*	*1.700.000.000*
		4.1.01.13	**7. Pajak Sarang Burung Walet**	**50.000.000**
		4.1.01.13.01.0001	*- Pajak Sarang Burung Walet*	*50.000.000*
		4.1.01.20	**8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**1.985.946.400**
		4.1.01.20.01.0001	- Opsen PKB	1.985.946.400
		4.1.01.21	**9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**2.127.840.000**
		4.1.01.21.01.0001	*- Opsen BBNKB*	*2.127.840.000*
			Sub Total Pajak Daerah	**12.729.286.400**
2.		**4.1.02**	**B. RETRIBUSI DAERAH**	
		4.1.02.01	**B1 Retribusi Jasa Umum**	
	Dinas LH	**4.1.02.01.02**	**1. Pelayanan Kebersihan/Persampahan**	**400.000.000**
		4.1.02.01.02.0001	*- Pelayanan Kebersihan/Persampahan*	*400.000.000*
	Dishub	**4.1.02.01.04**	**2. Pelayanan parkir ditepi jalan umum**	**280.300.000**
		4.1.02.01.04.0001	*Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*	*280.300.000*
			-Kendaraan Roda Dua	*219.000.000*
			- Kendaraan Roda Tiga	*3.300.000*
			-Kendaraan Roda Empat	*58.000.000*
	DisKoprindag	**4.1.02.01.05**	**3. Pelayanan Pasar**	**358.184.000**
		4.1.02.01.05.0001	*- Pelataran*	*84.400.000*
		4.1.02.01.05.0002	*- Los*	*125.367.000*
		4.1.02.01.05.0003	*- Kios*	*148.417.000*
			Sub Total Retribusi Jasa Umum	**1.038.484.000**
3.		**4.1.02.02**	**B2 Retribusi Jasa Usaha**	
		4.1.02.02.03	**1. *Retribusi Tempat Pelelangan***	**500.000.000**
	Dinas Perikanan	*4.1.02.02.03.0001*	*- Retribusi Penyediaaan Tempat Pelelangan*	*500.000.000*
	Dinas Pertanian	4.1.02.02.07	**2 Retribusi Rumah potong hewan**	**35.000.000**
		4.1.02.02.07.0001	*- Retribusi Pelayanan rumah potong hewan*	*35.000.000*
	Dishub	4.1.02.02.16	**3 Retribusi Pelayanan Jasa kepelabuhanan**	**270.000.000**
		4.1.02.02.16.0001	*Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan*	*270.000.000*
			- Pelayanan kepelabuhanan untuk Pengantar Penumpang Penjemput	*90.000.000*
			- Pelayanan kepelabuhanan untukKendaraan Gol. II	*15.000.000*
			- Pelayanan kepelabuhanan untuk Kendaraan Gol. IV	*20.000.000*
			- Pelayanan kepelabuhanan untuk Kendaraan Gol. VI	*1.000.000*
			- Jasa Tambat	*144.000.000*
	Dinas Pariwisata	4.1.02.02.17	**4 Retribusi Pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga**	**500.000**
		4.1.02.02.17.0001	*-Retribusi Pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga*	*500.000*

	Dishub	4.1.02.02.18		5	**Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air**	**24.000.000**
		4.1.02.02.18.0001			*Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air*	*24.000.000*
					- Penyeberangan di atas air untuk Penumpang Perorang	*10.000.000*
					- Penyeberangan di atas air untuk kendaraan golongan II	*11.000.000*
					- Penyeberangan di atas air untuk kendaraan golongan IV	*2.000.000*
					- Penyeberangan di atas air untuk kendaraan golongan VI	*1.000.000*
		4.1.02.02.01		6	**Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah**	**780.000.000**
	Bapenda	*4.1.02.02.01.0001*			*- Penyewaan Tanah dan Bangunan*	*100.000.000*
	Bapenda	*4.1.02.02.01.0002*			*- Penyewaan Tanah*	*10.000.000*
	Dinas PUPR	*4.1.02.02.01.0004*			*- Pemakaian Laboratorium*	*150.000.000*
		4.1.02.02.01.0006			*- Pemakaian Kendaraan Bermotor :*	520.000.000
	Dinas PUPR				- Alat Berat	450.000.000
	Pertanian				- Alsintan	10.000.000
	Dishub				- Bus	30.000.000
	Dishub				- Spead Boat / Kapal Laut	30.000.000
					Sub Total Retribusi Jasa Usaha	**1.609.500.000**
	Dinas PUPR	**4.1.02.03**		**B3**	**RETRIBUSI IZIN TERTENTU**	
		4.1.02.03.07		1.	**Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**	**100.000.000**
		4.1.02.03.07.0001			*Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)*	*100.000.000*
					Sub Total Reribusi Izin Tertentu	**100.000.000**
					Sub Total B1 + B2 + B3	**2.747.984.000**
4.	BPKAD	**4.1.03**	**C.**		**HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN**	
		4.1.03.02	1.		**Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah**	
					(Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD	
		4.1.03.02.01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	
					(Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Lembaga keuangan)	
		4.1.03.02.01.0001			*- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah*	*6.206.000.000*
					(Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Lembaga keuangan)	
					Bank Sulawesi Tengah	
		4.1.03.02.03			Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah	
					(Dividen) Atas Penyertaan Modal pada BUMD(Bidang Air Minum)	
		4.1.03.02.03.0001			*- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah*	*25.000.000*
					(Dividen) Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	
					(Bidang Air Minum) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	
					Sub Total	**6.231.000.000**
5.		**4.1.04**	**D.**		**LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :**	
	BPKAD	**4.1.04.01**		1.	**Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan**	**100.000.000**
		4.1.04.01.08			Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	
		4.1.04.01.08.0001			-Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	100.000.000
		4.1.04.03		2.	**Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan**	**29.500.000**
		4.1.04.03.02.0001			*- Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD*	*29.500.000*
	BPKAD	**4.1.04.05**		3.	**Jasa Giro**	**2.010.000.000**
		4.1.04.05.01			Jasa Giro pada Kas Daerah	
		4.1.04.05.01.0001			*- Jasa Giro pada Kas Daerah*	*2.000.000.000*
		4.1.04.05.02			Jasa Giro Pada Kas Bendahara	
		4.1.04.05.02.0001			*- Jasa Giro Pada Kas Bendahara*	*10.000.000*
		4.1.04.08		4.	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**8.000.000.000**
		4.1.04.08.02			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	
		4.1.04.08.02.0001			*- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain*	*8.000.000.000*
		4.1.04.16		5.	**Pendapatan BLUD**	**33.949.102.256**
		4.1.04.16.02.0001			*Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan*	*33.949.102.256*
					- RSUD Trikora Salakan	**24.000.000.000**
					- Blud dari jasa Layanan	24.000.000.000
					- PUSKESMAS	**9.949.102.256**
					Puskesmas Totikum	**1.148.000.000**
					- Jasa Layanan Umum	*25.000.000*
					- Non Kapitasi	*290.000.000*
					- Kapitasi BPJS	*833.000.000*
					Puskesmas Salakan	**1.172.440.000**
					- Jasa layanan Umum	*20.000.000*
					- Non kapitasi BPJS	*40.000.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	*1.112.440.000*
					Puskesmas Tataba	**485.249.200**
					- Jasa layanan Umum	*18.000.000*
					- Non kapitasi BPJS	*66.000.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	401.249.200
					Puskesmas Lolantang	**553.373.140**
					- Jasa layanan Umum	*3.000.000*
					- Dana Non kapitasi	*120.773.140*
					- Dana Kapitasi JKN	429.600.000
					Puskesmas Bulagi	**943.541.112**
					- Jasa layanan Umum	*40.000.000*
					- Non kapitasi BPJS	*240.000.083*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	*663.541.029*
					Puskesmas Patukuki	**592.604.800**
					- Jasa layanan Umum	*10.000.000*
					- Non kapitasi BPJS	*74.400.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	*508.204.800*

					Puskesmas Sabang	**584.087.028**
					- Jasa layanan Umum	*15.000.000*
					-Non kapitasi BPJS	*57.537.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	*511.550.028*
					Puskesmas Lumbi-Lumbia	**426.538.000**
					- Jasa layanan Umum	*5.000.000*
					- Non kapitasi BPJS	*10.000.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	*411.538.000*
					Puskesmas Mansamat	**823.043.400**
					- Jasa layanan Umum	*25.000.000*
					- Non Kapitasi	*200.000.000*
					- JKN	*598.043.400*
					Puskesmas Saleati	**468.535.480**
					- Jasa layanan Umum	*6.920.000*
					- Non kapitasi BPJS	*26.000.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	*435.615.480*
					Puskesmas Tinangkung Utara	**716.175.800**
					- Jasa layanan Umum	*7.040.000*
					- Non kapitasi BPJS	*240.000.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	*469.135.800*
					Puskesmas Totikum Selatan	**705.149.000**
					- Jasa layanan Umum	*25.000.000*
					- Non kapitasi BPJS	*160.000.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	*520.149.000*
					Puskesmas Bakalan Raya	**258.719.000**
					- Jasa layanan Pasien Rawat Jalan	*9.568.000*
					- Non kapitasi	*36.000.000*
					- Dana Kapitasi (JKN)	*213.151.000*
					Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	**966.299.736**
					- Jasa layanan umum	*9.600.000*
					- Non kapitasi BPJS	*331.149.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	625.550.736
					Puskesmas Bonepuso	**105.346.560**
					- Jasa layanan Umum	*2.000.000*
					- Non kapitasi BPJS	*10.000.000*
					- Kapitasi BPJS (JKN - FKTP)	93.346.560
Sub Total Lain - Lain PAD yang Sah						***44.088.602.256***
Jumlah Total A + B + C + D						***65.796.872.656***

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY